



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 243 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sekretariat DPRPT perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: /2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: /4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Sekretaris DPRPT di Nabire.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/ 236 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
 100.3.3.1/10 TAHUN 2025 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP	JABATAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	dr. SILWANUS A SOEMOELE, SpOG (K).,M.H.Kes NIP 197106032000121004	Pengguna Anggaran
		BEATRICK ROMBE, S.E. NIP198912232011042002	Bendahara Pengeluaran
		VIVIAN ANDENITA GOBAI, S.IP NIP 198606032007012001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum
		SURYA DARMAN RITHO, S.T. NIP 198008072017121001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum
		MARTINUS AGAPA, S.E., M.Ak. NIP 198102162006051002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Barang Dan Jasa
		MASRI MUKSIN, S.STP. NIP 199404152016091002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Barang Dan Jasa

		YOHANES YOU, S.Ag.,M.Hum. NIP 197501142000031002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		EDWIN DEDA, S.E. NIP 197907052023111001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos NIP 196802131996101001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		MARYAM NGANGUN NIP 197705042009012025	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H. NIP 197606082002121002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum
		SITTI NURLAELA M PATURUSI, S.Hut. NIP 198110292023102001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum
		MELIANUS KOTOUKI, S.IP., M.Si NIP 198105102005021003	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi
		MARIANA IYAI NIP 198608142018122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NURHAIDAH, S.E. NIP 197805292003122005	Pengguna Anggaran
		TRIKO DATU MUSA, S.Pd NIP 198701112017111001	Bendahara Pengeluaran
3.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dr. AGUS M. Kes.,CH. Med., CHT. NIP 198008292008011011	Pengguna Anggaran
		SUSANA FITRIYANI RAUF, S.Km., M.M. NIP 198108012006052001	Bendahara Pengeluaran
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Ir. YULIANUS M. MAMBRASAR, S.T., M.Si, M.T. NIP 197607031996101001	Pengguna Anggaran
		PERMAWATI, S.E. NIP 198102092008012013	Bendahara Pengeluaran
5.	DINAS KEBAKARAN, PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAT POL PP	OTIS MONEI, S.Sos., M.Si NIP 197910022000121005	Pengguna Anggaran
		ULFA ROCHIMATUL ANDAIYAH, A.Md NIP 198010312008012011	Bendahara Pengeluaran

6.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	RONI MISIKMBO, S.Sos NIP 198206092006051001	Pengguna Anggaran
		ANI DEGEI, S.Sos NIP 197708042011042002	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FRETS JAMES BORAY, S.E.,M.Si NIP 196702181989121002	Pengguna Anggaran
		SISILIA LIMBONG P, SE NIP 198404212011042002	Bendahara Pengeluaran
8.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	FRENCE THE PAPARA, S.IP., MAP NIP 197210131992031004	Pengguna Anggaran
		HERRY KAMISOPA, S.Sos NIP 197601202001121005	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si NIP 197310242000121002	Pengguna Anggaran
		ARLIN RATUNNA NIP 196905071992022002	Bendahara Pengeluaran
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	ALBERTUS IYAI, A.Md NIP 197603272000121001	Pengguna Anggaran
		ANDRIS PANDENSOLANG NIP 19820403 201004 1 003	Bendahara Pengeluaran
11.	DINAS PERHUBUNGAN	EWANGGEN KOKOYA, S.Th., M.AP NIP 19700502 200003 1 005	Pengguna Anggaran
		SUPARTI NIP 197901202015072001	Bendahara Pengeluaran
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	HAM A. NAWIPA, S.SIT NIP 197604261991031008	Pengguna Anggaran
		NOVITA GOBAY NIP 199211302015112001	Bendahara Pengeluaran
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	NORBETUS MOTE, SE, M.Si NIP 197311232005021003	Pengguna Anggaran

	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DANIEL INGGIRIK NIP 197207241996101001	Bendahara Pengeluaran
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Drs. SEMUEL RIHI, M.Si NIP 196509151993071001	Pengguna Anggaran
		MERYANTI PATALLE NIP 198203112015112001	Bendahara Pengeluaran
15.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JEM TELENGGEN, S.E., M.AP NIP 197911172003121003	Pengguna Anggaran
		MARSHALL CHRISNA LAWANASI SABA NIP199805052022081002	Bendahara Pengeluaran
16.	SEKRETARIAT DPRD	MASSORA, S.Hut., M.Si. NIP 196903241997031002	Pengguna Anggaran
		FRANS JERYS, ST NIP 198106102015121001	Bendahara Pengeluaran
		YULITA DEISYI, S.E., M. AK. NIP 198407192006052003	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
		TITO HADI SUTRISNO, A.Md NIP 197907122006051002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
		YUNITA OLGA RUMBEWAS, S.E.,M.Si NIP 197506022000122006	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		YOHANNA WELMINA MANDOWEN NIP 197305282006052001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	ELIESER YOGI, S.STP.,M.Si NIP 198102182001121001	Pengguna Anggaran
		NIAN RAUF, S.KM., M.Kes NIP 198411132010042004	Bendahara Pengeluaran
18.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ALEXANDER MANANGSANG, S.Sos NIP 197411022000121004	Pengguna Anggaran
		DOLYUS HARNIWAN BINTARA NIP 198901032017121002	Bendahara Pengeluaran
		FARIDA WATUBUN NIP198207052023112001	Bendahara Penerimaan
		NICOLAS B.F. MAYOR, A.Md NIP 197111032000121003	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Nabire

		ALFANI WAHYU SEJATI, SE NIP 198409132023112001	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Nabire
		JOHN SROYER NIP 197406142009021002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Nabire
		ABIAN PEKEI, S.Sos NIP 197210071996101001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Paniai
		MURDIONO, SE NIP 198005072009041009	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Paniai
		FERDIAN NAWIPA NIP 197802022008011002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Paniai
		DANIEL PANCA PASANDA, AP, M.Si NIP 197604061994121002	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Timika
		ALFIAN ARMIN NIP 198510262015041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Timika
		YERIMIAS EDMADRIGO M. IYAI, S.Tr.IP NIP 200007302022081001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Timika
		AKHIR IRIBARAM, SE., MM NIP 196806121997121001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Mulia
		YOSEPH SEMUEL KREEUW NIP 198609192011041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Mulia
		SLAMET DARSONO NIP 197803112010011001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Mulia
19.	BKPSDM	DENCI MERI NAWIPA, S.IP. NIP 197512272005022004	Pengguna Anggaran
		NOVITA FINCE ADII, S.IP NIP 199211172020102001	Bendahara Pengeluaran
20.	INSPEKTORAT	APNIEL PONGTULURAN, S.Kom.,M.M. NIP 197904112005021005	Pengguna Anggaran
		ERNA PURWATI, SE NIP 198502042015012002	Bendahara Pengeluaran
21.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ALBERTUS ADII, ST, M.Si NIP 197811152006051004	Pengguna Anggaran
		ALFRIDA SOMBA, S.T. NIP 198204302015032002	Bendahara Pengeluaran

22.	SEKRETARIAT MRP	ELIMELEK EDOWAI, S.Sos NIP 197503061997121001	Pengguna Anggaran
		RONALD MUAL NIP 198009252015031002	Bendahara Pengeluaran

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002